

Nama : Ranum Sri Rahayu

NPM : 2313031074

Kelas : C

1. Struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya belum efisien. Porsi anggaran yang terlalu besar untuk gaji dan tunjangan guru (68%) menunjukkan dominasi belanja rutin dibanding belanja peningkatan kualitas. Sementara itu, alokasi untuk infrastruktur (12%) dan bantuan siswa (8%) relatif rendah, padahal kedua komponen ini sangat berpengaruh terhadap akses dan mutu pendidikan.

Bagian yang perlu direalokasi adalah:

- 1) Pengurangan proporsional belanja pegawai (melalui penataan distribusi guru, bukan pemotongan gaji)
- 2) Peningkatan anggaran infrastruktur dan digitalisasi, terutama di daerah terpencil
- 3) Penambahan bantuan berbasis kebutuhan siswa, untuk mengurangi ketimpangan

Realokasi ini penting karena masalah utama bukan kekurangan anggaran, tetapi ketidaktepatan distribusi.

2. Pembiayaan saat ini masih sangat bergantung pada pemerintah daerah, sehingga fleksibilitas dan inovasi terbatas. Oleh karena itu, perlu melibatkan sumber pembiayaan alternatif.

Beberapa model yang realistis:

- 1) Kemitraan pemerintah-swasta (Public-Private Partnership/PPP) untuk pembangunan infrastruktur dan teknologi sekolah
- 2) Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk bantuan pendidikan dan fasilitas digital
- 3) Skema beasiswa kolaboratif dengan lembaga swasta atau filantropi
- 4) Dana berbasis kinerja (performance-based grants) dari pemerintah pusat

Pelibatan pihak non-pemerintah dapat mempercepat pemerataan kualitas tanpa membebani APBD secara berlebihan.

3. Beberapa praktik negara OECD cukup realistis untuk diterapkan di Provinsi Nusantara Raya, terutama yang berkaitan dengan efisiensi dan pemerataan. Salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja, di mana alokasi dana tidak hanya didasarkan pada jumlah

siswa, tetapi juga pada capaian hasil pendidikan. Pendekatan ini dapat membantu memastikan bahwa anggaran digunakan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas belajar.

Selain itu, pendanaan berbasis kebutuhan siswa juga relevan untuk mengatasi ketimpangan antara sekolah di kota dan desa. Sekolah di daerah terpencil atau kurang berkembang dapat diberikan alokasi dana lebih besar agar memiliki kesempatan yang setara. Fokus pada peningkatan kualitas guru juga merupakan elemen penting yang dapat diadopsi, misalnya melalui pelatihan berkelanjutan dan pemberian insentif bagi guru di daerah sulit.

Namun, penerapannya di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Kapasitas pengelolaan di tingkat daerah dan sekolah belum merata, sementara sistem berbasis kinerja membutuhkan kemampuan manajerial dan data yang kuat. Selain itu, ketersediaan data pendidikan yang akurat masih terbatas, serta adanya resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi. Keterbatasan infrastruktur, terutama digital di daerah terpencil, juga menjadi hambatan. Dengan demikian, meskipun praktik OECD dapat diadaptasi, penerapannya perlu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi lokal agar dapat berjalan efektif.

4. Rancangan reformasi pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya untuk lima tahun ke depan perlu dilakukan secara bertahap, terarah, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Reformasi ini tidak hanya berfokus pada perubahan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta sistem pengawasan yang lebih efektif.

- 1) Perubahan Struktur Belanja

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah daerah perlu melakukan penataan ulang struktur belanja pendidikan agar lebih berorientasi pada peningkatan mutu. Porsi belanja pegawai yang saat ini sangat besar tidak harus dikurangi secara drastis, tetapi dapat ditekan secara bertahap melalui kebijakan redistribusi guru dan pengendalian rekrutmen baru. Di sisi lain, anggaran untuk infrastruktur, khususnya fasilitas dasar dan digitalisasi sekolah, perlu ditingkatkan secara signifikan, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, alokasi untuk bantuan siswa juga perlu diperbesar agar akses pendidikan menjadi lebih merata, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 2) Strategi Peningkatan Kualitas Guru

Peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas utama dalam reformasi ini. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui program pelatihan berkelanjutan yang

berfokus pada peningkatan kompetensi pedagogik dan literasi digital. Selain itu, perlu adanya kebijakan redistribusi guru agar tidak terjadi penumpukan di wilayah perkotaan dan kekurangan di daerah terpencil. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah dapat memberikan insentif khusus bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah sulit. Evaluasi kinerja guru juga perlu diperkuat dengan mengaitkannya pada hasil belajar siswa, sehingga mendorong peningkatan kualitas pembelajaran secara nyata.

3) Digitalisasi Sekolah

Digitalisasi menjadi langkah penting untuk mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jaringan internet dan perangkat pembelajaran di sekolah, khususnya di daerah yang masih tertinggal. Selain itu, pengembangan platform pembelajaran digital dapat membantu proses belajar mengajar menjadi lebih fleksibel dan inovatif. Namun, digitalisasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan pengguna. Oleh karena itu, pelatihan bagi guru dan siswa dalam memanfaatkan teknologi pendidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

4) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Agar reformasi berjalan efektif, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dan berbasis data. Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem informasi pendidikan yang mampu memantau kinerja sekolah secara real time, termasuk capaian literasi, numerasi, dan pemerataan akses. Selain itu, perlu ditetapkan indikator kinerja yang jelas sebagai dasar evaluasi penggunaan anggaran. Transparansi juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat ikut mengawasi. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih akuntabel dan tepat sasaran.